

# EVALUASI REVITALISASI PERTANIAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

DIREKTORAT EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SEKTORAL  
email: yohandarwati@bappenas.go.id

## ABSTRAK

Kajian evaluasi terhadap pembangunan pertanian dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan petani ini dilandasi pemikiran bahwa peran petani tidak pernah lepas dari pembangunan pertanian. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menyusun kerangka evaluasi program peningkatan kesejahteraan petani; memperoleh gambaran pelaksanaan dan capaian-capaian kebijakan revitalisasi pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani; dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait revitalisasi pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. Metode yang digunakan terdiri dari tiga metode teknis analisis yaitu statistik deskriptif berupa analisis keragaan data yang berkenaan dengan rata-rata, komposisi dan sebaran data. Kemudian, analisis kuadran yang umumnya digunakan untuk memetakan dua kondisi yang saling terkait, dan metode analisis kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari berbagai publikasi instansi dan lembaga terkait.

Dalam kurun waktu implementasi RPJMN 2004-2009, berbagai program dan kegiatan dalam kerangka Revitalisasi Pertanian telah direalisasikan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi penduduk miskin perdesaan serta peningkatan kesejahteraan petani. Secara umum, dalam rentang waktu tersebut, Kebijakan Revitalisasi Pertanian telah memberikan dampak yang nyata pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator tingkat kesejahteraan petani, meskipun berbagai kendala masih banyak ditemui. Berdasarkan capaian dan permasalahan yang telah dihadapi serta arah pembangunan yang akan datang, revitalisasi pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani menghadapi beberapa tantangan yang fundamental, antara lain: optimalisasi lahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup; ketersediaan infrastruktur, pupuk dan bibit sebagai input pertanian; penanganan dan antisipasi perubahan iklim dan bencana; akses permodalan, dan tata niaga pertanian.

Kajian ini menghasilkan beberapa butir rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan revitalisasi pertanian yang akan datang, antara lain: (1) Revitalisasi lahan pertanian; (2) Rehabilitasi dan peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup; (3) Pengembangan strategi mitigasi bencana dan perubahan iklim dalam sektor pertanian; (4) Peningkatan ketersediaan pupuk dan alternatifnya; (5) Peningkatan ketersediaan infrastruktur; (6) Peningkatan akses permodalan; (7) Penguatan sistem usaha perbenihan dan pembibitan; (8) Pembenahan tata niaga pertanian; (9) Penguatan kelembagaan petani, pertanian dan pedesaan; dan (10). Penguatan dan peningkatan peran pemerintah daerah.

## 1. LATAR BELAKANG

Hingga saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan tingkat produktivitas dan pendapatan usaha yang relatif rendah. Dengan sebagian besar masyarakat hidup di perdesaan maka kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan banyak terdapat di perdesaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan harus dilakukan dengan membangun pertanian dan perdesaan.

Sebagai salah satu prioritas kebijakan untuk mewujudkan misi Indonesia yang sejahtera, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2004-2009, revitalisasi pertanian diharapkan mampu meningkatkan: ketahanan pangan; kapasitas dan kapabilitas petani dan keluarganya; akses petani terhadap sumberdaya dan informasi; serta peningkatan daya saing, mutu dan nilai tambah komoditas pertanian bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Revitalisasi pertanian ini akan menyumbang pada percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja baru.

Perilaku petani yang masih berusaha tani secara individual, langkanya dokumen kepemilikan lahan, serta kesulitan di dalam mengakses dana perbankan masih mendominasi lambannya upaya pencapaian sasaran revitalisasi pertanian. Demikian pula halnya dengan perhatian Kepala Daerah terhadap pembangunan pertanian di wilayahnya masing-masing sangat bervariasi.

Persoalan-persoalan tersebut di atas sangat mempengaruhi posisi tawar petani terhadap pelaku pasar lainnya, sehingga harga yang diterima petani belum sesuai dengan korbanan yang mereka keluarkan. Fenomena dimana pada saat panen raya harga jual komoditas pertanian sangat rendah dan sebaliknya meningkat pada saat petani sudah tidak memiliki produk, di beberapa lokasi masih menjadi masalah.

Selain itu, persoalan mendasar yang dihadapi sektor pertanian pada saat ini dan di masa yang akan datang adalah meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; sedikitnya status dan kecilnya luas kepemilikan lahan; lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional; keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani; lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh; masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi; belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik; rendahnya NTP, dan belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian.

## 2. TUJUAN

Seperti telah diuraikan di atas selain menjadi salah satu prioritas pembangunan jangka menengah nasional 2004-2009 pembangunan sektor pertanian juga membawa implikasi yang sangat penting terhadap pembangunan jangka menengah 2010-2014. Ketahanan Pangan, menjadi salah satu dari 11 prioritas RPJMN 2010-2014. Dalam bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menjadi salah satu prioritas bidang. Dengan kata lain, berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian dalam periode 2004-2009 akan membawa implikasi yang sangat besar terhadap pembangunan 2010-2014.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, evaluasi pembangunan pertanian pada periode 2004-2009 penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, kajian ini ditujukan untuk mengevaluasi sejauhmana kinerja pembangunan pertanian selama periode tahun 2004-2009 berdasarkan kebijakan dan sasaran yang tercantum di dalam RPJMN 2004-2009, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian terutama dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani.

Secara khusus, tujuan dari evaluasi ini adalah untuk; (1) Menyusun kerangka evaluasi program peningkatan kesejahteraan petani; (2) Memperoleh gambaran pelaksanaan dan capaian-capaian kebijakan revitalisasi pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani; dan (3) Menyusun rekomendasi kebijakan terkait revitalisasi pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani.

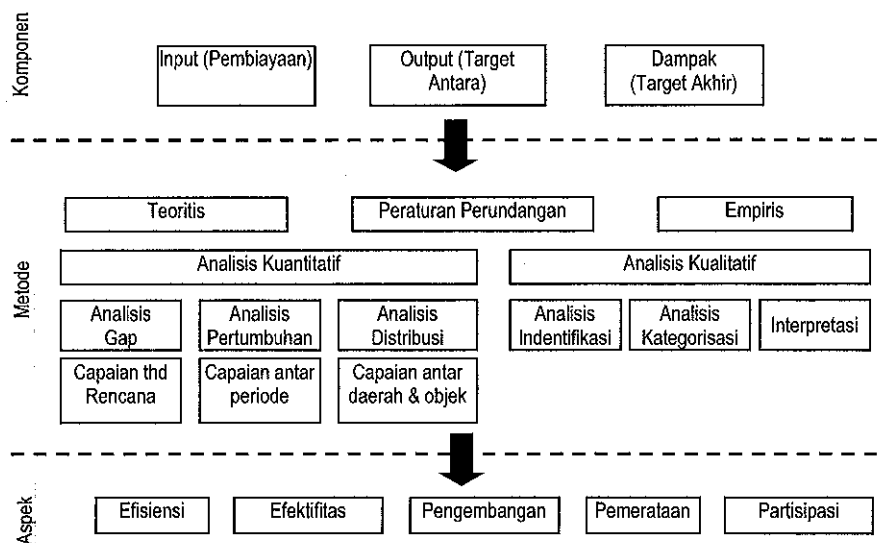
Ruang lingkup kajian dijabarkan sebagai berikut:

- Ruang lingkup substansi meliputi bidang-bidang sosial ekonomi pertanian termasuk diantaranya perekonomian secara umum, pertanian, kesejahteraan petani, kemiskinan desa-kota, serta substansi sosial ekonomi pertanian terkait lainnya.
- Ruang lingkup wilayah meliputi seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan studi kasus pada daerah-daerah yang menjadi tujuan studi lapang.
- Ruang lingkup periode, sesuai dengan RPMJN terdahulu, periode 2004-2009.

## 3. METODOLOGI

### 3.1. KERANGKA ANALISIS

Dengan menggunakan indikator yang telah dibuat pada setiap komponen evaluasi, baik evaluasi input, evaluasi output maupun evaluasi dampak; akan dilihat beberapa hal misalnya terkait dengan gap antara realisasi dan rencana, capaian antar periode dan capaian antar daerah dan obyek. Sedangkan, analisa kualitatif akan digunakan untuk identifikasi, kategorisasi dan interpretasi, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Analisis

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana kinerja pembangunan pertanian selama periode tahun 2004–2009 berdasarkan kebijakan dan sasaran yang tercantum di dalam RPJMN 2004-2009. Sasaran yang dijabarkan pada RPJM 2004-2009 akan dibandingkan dengan capaian yang dihasilkan (analisis gap). Dengan analisis pertumbuhan, dapat diketahui bagaimana pertumbuhan yang dicapai pada setiap periode. Walaupun sasaran belum dapat tercapai, akan tetapi kita dapat melihat bagaimana penurunan/peningkatan pertumbuhan setiap periode. Selain itu juga, perlu diketahui bagaimana distribusi capaian dari setiap aspek untuk setiap wilayah. Data sekunder dan primer yang digunakan dalam penelitian ini akan diidentifikasi, kategorisasi, dan interpretasi, sehingga dapat diketahui bagaimana capaian dari setiap aspek tersebut, dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bagaimana dampak pembangunan yang telah berjalan terhadap kesejahteraan petani.

### 3.2. TEKNIS ANALISIS

#### 3.2.1. Statistik Deskriptif

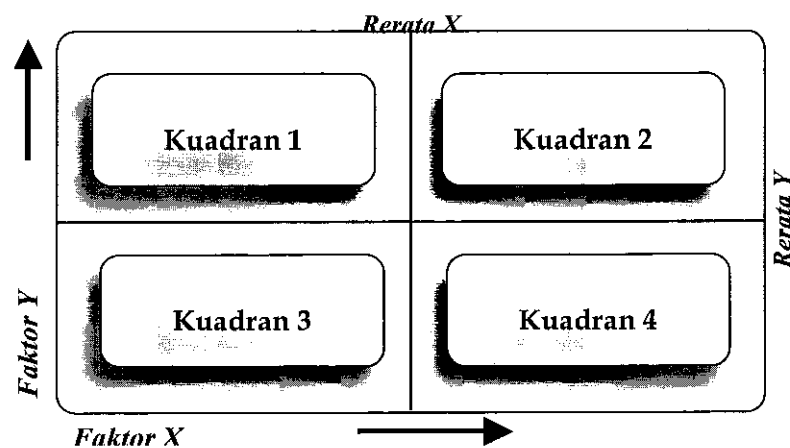
Analisis statistik deskriptif adalah analisis keragaan data yang berkenaan dengan rata-rata, komposisi dan sebaran data. Analisis ini krusial artinya untuk melakukan identifikasi awal perilaku data dan erat kaitannya dengan arah analisis dan penentuan kebutuhan metode kuantitatif lebih lanjut. Analisis ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran ringkas (snapshot) indikator-indikator yang digunakan dalam kajian. Untuk analisis digunakan metode statistik seperti rata-rata, rasio (persentase), pertumbuhan, standart deviasi dan lain sebagainya. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Dengan kata lain, statistik deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan.

#### 3.2.2. Analisis Kuadran

Analisis kuadran umumnya digunakan untuk memetakan suatu objek pada 2 kondisi yang saling berkaitan. Dengan demikian, melalui analisis kuadran ini dapat diketahui kondisi relatif satu objek terhadap objek lainnya dalam 2 ukuran yang saling berkaitan. Sementara itu untuk melakukan analisis kuadran, masing-masing objek dipetakan dalam satu Diagram Kartesius. Terdapat 2 komponen penting dalam Diagram Kartesius. Pertama garis potong (garis tolak) sumbu X dan sumbu Y, serta kedua adalah 4 kuadran yang dihasilkan dari perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Untuk menentukan titik potong digunakan nilai rata-rata dari nilai X dan nilai Y seluruh objek (1,...,j), yaitu:

$$\bar{X}(\bar{Y}) = \frac{\sum_j^j X(Y)_j}{j}$$

Dari kedua garis potong di atas akan dihasilkan 4 kuadran. Kondisi yang interpretasi masing-masing kuadran akan sangat bergantung pada arah dan keterkaitan antara kedua ukuran yang digunakan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan analisis kuadran seperti yang digunakan Briguglio (2004).



Sumber: Briguglio (2004), dimodifikasi.

Gambar 2. Analisis Kuadran

#### 3.2.3. Analisis Kualitatif

Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkategorisasi dan meninterpretasikan secara komprehensif hasil studi yang dilakukan. Beberapa tahap kegiatan analisis yakni :

- Metode Identifikasi. Kegiatan ini dilakukan setelah semua informasi dan data terkumpul yang didasarkan atas beberapa fokus studi diatas. Identifikasi ini secara sederhana dilakukan berdasarkan point-point penting dan hal-hal yang menarik maupun kesamaan informasi maupun pandangan narasumber.
- Metode Kategorisasi, yaitu pengelompokan data berdasarkan hasil identifikasi yang disandingkan dalam sebuah matriks yang didasarkan fokus studi serta sumber informasi. Kategorisasi juga dilakukan sebagai dasar penyusunan kerangka kerja logis.

- c. Metode Interpretasi/penafsiran, yang dilakukan setelah pengaitan hubungan antar data. Interpretasi juga dilakukan dengan disertai teori-teori yang relevan. Sesuai kaidah penelitian kualitatif, melalui metode analisis yang dipilih, tim peneliti dapat membuat interpretasi dan dapat mempunyai kekuatan argumentasi didasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

### 3.3. DATA

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digunakan dalam studi ini bersumber dari berbagai publikasi instansi dan lembaga terkait. Untuk data-data yang berkait dengan komponen kegiatan digunakan data sekunder yang bersumber dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu data yang berkait dengan kerangka makro, perencanaan dan anggaran digunakan data sekunder yang bersumber dari Bappenas dan Departemen Keuangan. Data sekunder pendukung lainnya yang berkaitan dengan kependudukan dan kewilayahan digunakan data yang bersumber dari BPS.

Data sekunder yang dipergunakan dalam kajian ini antara lain data PDB sektor pertanian dan subsektornya, nilai tukar petani, banyaknya tenaga kerja sektor pertanian, produksi komoditas pertanian, jumlah penduduk miskin, neraca perdagangan pertanian, investasi pertanian, pembiayaan pertanian dan subsidi pertanian.

Selain itu, untuk mendukung analisis dengan data sekunder, digunakan data dan informasi yang bersifat primer yang dikumpulkan melalui FGD dan interview di daerah serta seminar untuk mendapatkan informasi dan masukan dari para pakar. Masukan diharapkan akan memperkaya dan mempertajam hasil analisis dan rekomendasi.

## 4. HASIL KAJIAN DAN ANALISIS

### Capaian Pembangunan Pertanian

Capaian pembangunan pertanian pada kajian ini menggunakan ukuran Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian. Secara umum diketahui bahwa nilai PDB sektor pertanian dan subsektornya pada periode 2005-2008 terus meningkat, kecuali pertumbuhan PDB subsektor kehutanan. Pertumbuhan PDB sektor pertanian dalam periode 2004-2009 mencapai rata-rata sebesar 3,5 persen per tahun. Angka ini telah mendekati sasaran RPJMN 2004-2009, yaitu rata-rata pertumbuhannya sekitar 3,52 persen per tahun.

**Tabel 1. Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian 2004-2009\*) (Persen)**

Sektor/Sub Sektor	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
1. Pertanian	2,82	2,72	3,36	3,43	4,77	3,75
2. Tanaman Bahan Makanan	2,89	2,60	2,98	3,35	5,91	3,45
3. Tanaman Perkebunan	0,40	2,48	3,79	4,40	3,84	3,59
4. Peternakan & Hasilnya	3,35	2,13	3,35	2,36	3,89	3,93
5. Kehutanan	1,28	(1,47)	(2,85)	(1,10)	(0,39)	1,70
6. Perikanan	5,56	5,87	6,90	5,39	4,81	5,50

Keterangan : \*) Semester I 2009  
Sumber : BPS, 2009

Ukuran selanjutnya adalah banyaknya tenaga kerja pada sektor pertanian. Secara umum, jumlah tenaga kerja pertanian (pertanian, perikanan dan kehutanan) berada pada kisaran 40% dari angkatan kerja nasional dan selama periode 2005-2009 cenderung meningkat. Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di pedesaan dan memiliki kultur budaya kerja keras, sebenarnya merupakan potensi tenaga kerja untuk mendukung pengembangan pertanian. Hingga saat ini terdapat lebih dari 43 juta tenaga kerja masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Akan tetapi besarnya jumlah penduduk tersebut belum tersebar secara proporsional sesuai dengan sebaran luas potensi lahan serta belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mendukung pengembangan pertanian yang berdaya saing.

Kemajuan pembangunan pertanian juga tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan variabel yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan petani. Pada tahun 2006 nilai tukar petani menunjukkan perbaikan dengan peningkatan sebesar 0,93 persen, dan pada tahun 2008 nilai tukar petani meningkat lagi sebesar 0,16 persen. Pada akhir tahun 2008, NTP mencapai 98,99 sedangkan sasaran NTP untuk tahun 2009 adalah sebesar 115, dan tercapai sebesar 100,79. Meskipun NTP belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari kesejahteraan petani, namun NTP sampai saat ini masih merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani. Selama tahun 2005-2009, rata-rata NTP mencatat angka mendekati 100 yang menunjukkan bahwa yang dibelanjakan petani masih lebih besar dari yang didapatkan.

Selanjutnya, produksi komoditas pertanian menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Target produksi pada tahun 2009 sebesar 63,5 juta ton, sementara berdasarkan angka ramalan (ARAM) III (Juni 2009) produksi padi telah mencapai 63,5 juta ton atau mencapai 100,5% dari target tahun 2009. Peningkatan ini telah menempatkan Indonesia meraih kembali status swasembada beras sejak tahun 2007. Selama periode tersebut, produksi padi meningkat sekitar 2,8 persen per tahun, jagung sebesar 9,8 persen, kedele sebesar 1,8 persen, dan ubi kayu sekitar 2,9 persen. Akan tetapi dalam periode tersebut produksi ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau mengalami penurunan masing-masing sekitar 0,3 persen, 2,1 persen, dan 1,0 persen per tahun. Pada tahun 2008 berdasarkan Angka Tetap (ATAP 2008) produksi padi mencapai 60,3 juta ton gabah kering giling, jagung 16,3 juta ton, kedele 775,7 ribu ton, dan ubi kayu 21,8 juta ton.

Pada subsektor perkebunan dan hortikultura, hanya komoditas teh yang kecenderungannya menurun dengan rata-rata penurunannya sebesar 2,2% per tahun. Kemudian, semua produksi meningkat pada komoditas hortikultura. Peningkatan terbesar terjadi pada produksi biofarmaka, yaitu sebesar 21,9% per tahun. Pada produksi komoditas peternakan, hanya produksi daging sapi yang menurun, yaitu rata-rata sebesar 5% per tahun. Pada sektor perikanan, pertumbuhan PDB perikanan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Terakhir, perkembangan subsektor kehutanan. Hutan tanaman industri (HTI) dan hutan tanaman rakyat (HTR) memiliki pertumbuhan positif tiap tahunnya selama periode 2004-2008

**Tabel 2. Produksi Komoditas Tanaman Pangan**

KOMODITAS	2005	2006	2007	2008	2009*	Pertumbuhan 2005-2008 (persen)	
	(ribu ton)						
Padi	54.089	54.151	54.455	57.157	60.326	63.840	3,69
Jagung	11.225	12.524	11.609	13.288	16.317	17.659	9,98
Kedele	724	808	748	593	776	966	0,90
Kacang Tanah	19.425	836	838	789	770	785	-2,67
Kacang Hijau	1.902	321	316	322	298	314	-2,37
Ubi Kayu	838	19.321	19.987	19.988	21.757	22.376	4,10
Ubi Jalar	310	1.857	1.854	1.887	1.882	2.027	0,45

Sumber: Pusat Data Pertanian.

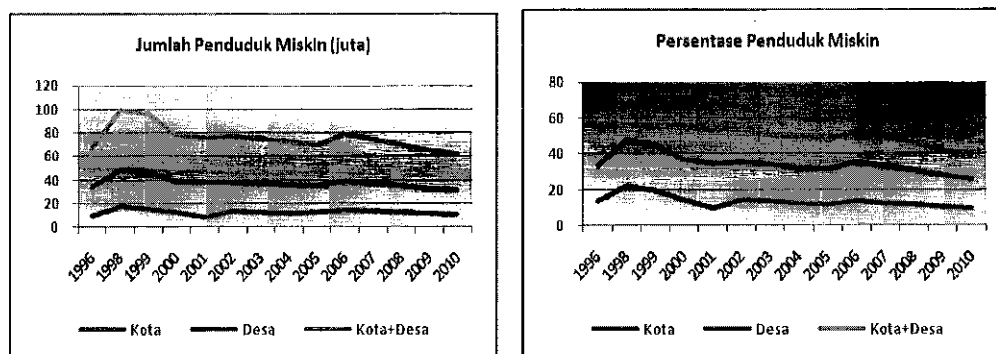
### Pembiayaan Pertanian 2005-2009

Dari sisi pembiayaan pertanian pada periode 2005-2009, alokasi anggaran bidang pertanian meningkat dari Rp. 7,33 triliun (2005) menjadi Rp.16,16 triliun (2009). Sementara itu, alokasi anggaran sub bidang pertanian mengalami peningkatan signifikan dari Rp.4,02 triliun (2005) menjadi Rp. 8,42 triliun (2009). Capaian pembiayaan sub bidang pertanian sepanjang 2005-2009 cukup baik dengan rata-rata capaian sebesar 79,64%. Masalah yang muncul pada capaian pembiayaan pertanian adalah struktur pemerintah di daerah, satuan kerja (satker) yang besar menyebabkan sulitnya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, pembiayaan pertanian lainnya bersumber pada alokasi belanja subsidi. Berdasarkan data realisasi anggaran subsidi 2005-2009, subsidi pertanian mengalami peningkatan yang cukup besar utamanya sejak tahun 2006. sepanjang 2006-2009 subsidi pangan, subsidi pupuk dan subsidi benih mengalami peningkatan rata-rata masing-masing sebesar 24,6%, 71,6% dan 105,5%. Pembiayaan pembangunan pertanian juga bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada periode 2005-2009, alokasi DAK pertanian mengalami peningkatan paling tidak hingga tahun 2006, kemudian hingga tahun 2009 besaran DAK sama tiap tahunnya. Selanjutnya, anggaran untuk program peningkatan kesejahteraan petani (PKP) menunjukkan kecenderungan meningkat tiap tahunnya, yaitu sebesar Rp. 424 miliar (2005) menjadi Rp. 3 triliun (2009). Program PKP ini telah sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dengan menetapkan output dan outcomes.

### Pembangunan Pertanian dan Realitas Kemiskinan Perdesaan

Pembangunan pertanian tidak dapat dipisahkan dari kemiskinan. Penduduk miskin perdesaan lebih besar dari perkotaan. Sebagian besar penduduk miskin perdesaan berprofesi sebagai petani. Jumlah dan persentase penduduk miskin periode 1996-2010 berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Penduduk miskin perdesaan lebih besar dari perkotaan jumlah dan persentase penduduk miskin periode 1996-2010 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Selama periode 1996-2010, penduduk miskin menurun dari 34,01 juta (1996) menjadi 31,02 juta (2000). Untuk kota mengalami peningkatan, yaitu dari 9,42 juta menjadi 11,1 juta, sedangkan untuk desa mengalami penurunan dari 24,59 juta jiwa menjadi 19,93 juta. Secara persentase juga menunjukkan adanya penurunan, dari 17,47 persen menjadi 13,33 persen. Desa dan kota menunjukkan tren yang sama. Desa menurun dari 19,78 persen menjadi 16,56 persen, sedangkan kota menurun dari 13,39 persen menjadi 9,87 persen. Pada tahun 2006 penduduk miskin sempat mengalami peningkatan menjadi 39,3 juta (17,75persen), hal ini karena adanya inflasi pada saat itu yang mencapai 17,95 persen.



Sumber: BPS, diolah

**Gambar 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**

Dari jumlah penduduk miskin tersebut diantaranya tersebar di pedesaan yang secara geografis sebagian besar penduduknya hidup bermatapencaharian dari sektor pertanian. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian sebagai mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat Indonesia berada dalam lingkup kemiskinan secara agroekosistem.

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, baik yang dilakukan oleh kepala rumah tangga maupun secara individu penduduk bahwa persentase penduduk miskin pada sektor pertanian mencapai diatas 50 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di lapangan pekerjaan lainnya. Berdasarkan data BPS (2004), penyebaran penduduk miskin berdasarkan lapangan pekerjaan pada 30 provinsi yang ada selama ini, menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian lah yang menempati persentase cukup besar dibandingkan dengan sektor pekerjaan lainnya. Sedangkan berdasarkan distribusi penduduk miskin di sektor pertanian, menunjukkan bahwa penduduk miskin pada subsektor tanaman pangan mencapai 75 persen, kemudian perkebunan dan kehutanan 13 persen, peternakan 5 persen dan perikanan 7 persen (BPS, 2006).

Permasalahan kemiskinan pedesaan secara spesifik dalam kegiatan pertanian sangat beragam berdasarkan agroekosistem maupun usahatani yang dilakukan maka upaya kearah pemahaman akar kemiskinan itu sendiri merupakan prasyarat utama dan penting untuk dilakukan. Pemahaman dan kriteria tentang batasan kemiskinan yang khusus berdasarkan kondisi pertanian secara spesifik sudah saatnya dipikirkan kembali agar penanganan masalah kemiskinan di sektor pertanian bisa lebih terarah dan pasti. Restrukturisasi terhadap data kemiskinan di sektor pertanian dengan segala batasan-batasan yang riil di tingkat petani, nampaknya perlu ditinjau kembali dalam upaya membenahi langkah konkrit yang akan diambil oleh pengambil kebijakan. Hal ini penting untuk penanggulangan sekaligus pengentasan melalui pemberdayaan masyarakat secara partisipatif di tingkat petani dapat terwujud dan mengenai sasaran, dan pada akhirnya tujuan untuk membantu mengikis jumlah kemiskinan di tingkat petani secara bertahap bisa berkurang. Dengan demikian secara bertahap pembangunan pedesaan yang bertumpu pada masyarakat pertanian terus berkembang pada kemampuan yang mandiri.

#### **Peningkatan Kesejahteraan Petani**

Secara umum sepanjang tahun 2005-2009, NTP menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis dimana rata-rata berada di atas angka 100. Pada tahun 2005, NTP mengalami tekanan yang cukup mendalam, yaitu NTP sebesar 98,27 (2007=100) dengan rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,15 persen dibandingkan tahun 2004. Tekanan ini bersumber pada kenaikan harga BBM. Kemudian, periode 2006-2009, NTP mengalami trend meningkat. Berdasarkan capaian NTP subsektoral, NTP Sub Sektor Perkebunan Rakyat (NTPR) menunjukkan perkembangan jauh di atas sub sektor lainnya.

Aspek yang sangat krusial dalam hal peningkatan kesejahteraan petani adalah masalah kemiskinan. Hal itu dikarenakan masyarakat miskin di daerah pedesaan sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan sangat ditentukan perkembangan di sektor pertanian. Untuk memetakan hubungan antara NTP dengan tingkat kemiskinan digunakan analisis kuadran. Analisis kuadran berikut memetakan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dalam 4 kondisi.

Kuadran pertama adalah daerah ideal atau Agricultural-Based dimana nilai tukar petani yang relatif lebih tinggi diikuti pula dengan persentase penduduk miskin pedesaan yang relatif lebih rendah. Terdapat beberapa provinsi di kuadran ini yaitu: Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Bali, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Kemudian kuadran kedua adalah daerah Non Agricultural-Based dimana nilai tukar petani yang relatif lebih rendah namun memiliki keunggulan-keunggulan lain sehingga penduduk miskin pedesaan relatif lebih rendah dari rata-rata nasional. Provinsi-provinsi di kuadran ini diantaranya: Kalimantan Tengah, Jambi, Banten, Riau, Bangka Belitung, Jawa Barat dan Maluku Utara.

Kuadran ketiga adalah daerah normatif dimana nilai tukar petani yang relatif lebih rendah diikuti pula dengan persentase penduduk miskin pedesaan yang relatif lebih tinggi. Dalam kuadran ini terdapat provinsi-provinsi seperti: Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian terakhir adalah kuadran keempat sebagai daerah Transisi dimana Nilai Tukar Petani yang relatif lebih tinggi namun dengan persentase penduduk miskin pedesaan yang relatif lebih tinggi pula. Di kuadran empat ini termasuk provinsi-provinsi seperti: Papua Barat, Papua, Maluku, NAD, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tenggara dan Lampung.

Satu hal yang sangat penting dari analisis kuadran tersebut adalah bahwa pembangunan sektor pertanian di daerah-daerah yang berada dalam kuadran ketiga dan keempat --utamanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani-- perlu lebih ditingkatkan lagi. Baik melalui optimalisasi pembangunan sektor pertanian maupun sektor-sektor lain yang sedikit banyak turut mempengaruhi upaya peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan pedesaan. Beberapa hal yang turut berpengaruh terhadap kondisi di atas adalah: kurang optimalnya upaya-upaya peningkatan kesejahteraan petani; masalah distribusi barang dan jasa; masalah tata niaga dan biaya-biaya baik produk pertanian maupun barang konsumsi rumah tangga.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Bustanul, 2005, *Pembangunan Pertanian: Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi*, Graziado, Jakarta.
- Bappenas. 2009. *Evaluasi Kinerja 4 Tahun RPJM 2004-2009*
- \_\_\_\_\_. *RPJMN 2004-2009*
- \_\_\_\_\_. *RPJMN 2010-2014*
- BPS. *Berbagai terbitan*
- Darmawan, Thomas dan Masroh, Antuji H, 2004, *Pentingnya Nilai Tambah Produk Pangan dalam Buku Pertanian Mandiri: Pandangan Strategis para Pakar untuk Kemajuan Pertanian Indonesia* (editor: Siswono Yudo Husodo dkk), Penebar Swadaya, Jakarta
- Iskandar, Johan, 2006, *Metodologi Memahami Petani dan Pertanian dalam Jurnal Analisis Sosial Vol 11 No.1 April 2006*, Yayasan AKATIGA-Pusat Analisis Sosial, Bandung.
- Renstra Departemen Pertanian 2004-2009
- Subejo, 2006, *Bahan Ajar Sosiologi Pertanian*, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta
- Suharto, Edi, 1997, *Analisis Kebijakan Sosial*, Diakses 12 Februari 2007. [http://www.policy.hu/suharto/modul\\_a/makindo\\_17.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_17.htm)
- Syahyuti, 2006, *Pembaruan Agraria dan Kebutuhan Lahan untuk Pertanian dalam Jurnal Analisis Sosial Vol.11 No.1 April 2006*, Yayasan AKATIGA-Pusat Analisis Sosial, Bandung.
- Yudohusodo, Siswono, 2006, *Kebijakan, Pendidikan, dan Hasil Penelitian Pertanian*, Seminar Nasional dengan tema *Paradigma Baru Pembangunan Pertanian dan Masa Depan Bangsa*, Lustrum XII Fakultas Pertanian UGM, 16 September 2006, Yogyakarta
- Yustika, Ahmad Erani, 2003, *Tragedi Petani dan Involusi Kebijakan Pertanian*, *Suara Pembaharuan Daily* Edisi 10 Oktober 2003.